

Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Disusun oleh Pokja Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Nusa Tenggara Timur



Pesan Kunci

- Pertumbuhan ekonomi hijau NTT bertujuan untuk mendorong pencapaian target pembangunan hijau yang berkelanjutan dari sumber daya terbarukan berbasis lahan serta turunannya.
- Terdapat 4 (empat) tujuan pertumbuhan ekonomi hijau Provinsi NTT dan 6 (enam) strategi yang merupakan terjemahan konkret dari masing-masing tujuan. Rumusan tujuan dan strategi ini menjadi basis untuk perumusan skenario, intervensi hingga kegiatan pertumbuhan ekonomi hijau di NTT.
- Terdapat berbagai konteks ekonomi dan sumber daya alam yang perlu diperhatikan dalam merumuskan turunan skenario, intervensi dan kegiatan yang sesuai untuk setiap strategi pertumbuhan ekonomi hijau, yang diantaranya mencakup: ekonomi wilayah, dinamika penggunaan lahan dan fungsi ekosistem, pengelolaan sumber daya alam dan aksi perubahan iklim berbasis gender.

Pengantar

Pertumbuhan ekonomi hijau Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan inisiatif yang mendasari perancangan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi hijau selaras dengan komitmen global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau SDGs), serta program dan target Pertumbuhan Ekonomi Hijau Nasional. Secara umum, pertumbuhan ekonomi hijau NTT bertujuan untuk mendorong pencapaian target pembangunan yang berkelanjutan dari sumber daya terbarukan berbasis lahan serta turunannya.

Secara nasional rencana pertumbuhan ekonomi hijau diharapkan dapat mendukung pencapaian *nationally determined contributions* (NDC) dalam penurunan emisi gas rumah kaca dan strategi adaptasi perubahan iklim. Pada tahun 2022, Indonesia merilis laporan *Enhanced NDC* yang menargetkan penurunan emisi sebesar 31,8% (dan 43,2% dengan dukungan internasional) serta implementasi adaptasi pada sektor strategis pangan, air, dan energi. NTT dalam dokumen NDC Indonesia, termasuk ke dalam wilayah terkering yang berisiko lebih parah dengan adanya perubahan iklim. Sedangkan kondisi ekonomi menunjukkan bahwa ketimpangan PDRB per kapita tiga kali lebih besar dibandingkan Pulau Jawa.

Perencanaan pertumbuhan ekonomi hijau di Provinsi NTT akan membantu untuk mengintegrasikan faktor kesesuaian iklim dengan perencanaan pengelolaan lahan. Penyusunan rencana pertumbuhan ekonomi hijau akan menggunakan pendekatan pertumbuhan ekonomi hijau yang responsif gender dan mengintegrasikan aspek ketahanan pangan. Hal ini berkesesuaian dengan potensi dan tantangan pengelolaan sumber daya alam di Provinsi NTT.

Tujuan Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Secara umum, pertumbuhan ekonomi hijau Provinsi NTT bertujuan untuk mendorong pencapaian target pembangunan hijau yang berkelanjutan dari sumber daya terbarukan berbasis lahan serta turunannya. Tujuan pertumbuhan ekonomi hijau Provinsi NTT menjadi acuan bagi perumusan strategi, skenario, intervensi, hingga kegiatan.

Berikut ini adalah 4 (empat) tujuan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi NTT yang telah disepakati oleh para pihak.

1. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif dan berkeadilan.

Harapannya, pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan serta memperhatikan perbedaan kebutuhan dan aspirasi perempuan dan laki-laki, dan berorientasi pada penurunan angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang didorong mengintegrasikan pertumbuhan hijau dan biru dengan disertai dengan pengembangan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan dan pemerataan.

2. Ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan berbasis desa.

Berbagai tantangan di masa yang akan datang, seperti dampak globalisasi dan perubahan iklim, menimbulkan munculnya permasalahan yang berpotensi mengganggu penghidupan masyarakat, seperti kerawanan pangan dan ketimpangan di kalangan masyarakat. Maka dari itu, perlu ditingkatkan tingkat adaptasi masyarakat terhadap perubahan yang berpotensi mengganggu, baik dari segi ketahanan sosial, ekonomi maupun lingkungan. Desa menjadi lokus sumber daya dan pembangunan yang penting yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan ketahanan masyarakat.

3. Ekosistem yang sehat dan produktif dalam menghasilkan jasa lingkungan.

Ekosistem yang sehat dan produktif perlu didukung dengan ekonomi yang berbasis teknologi dan inovasi, dengan arah yang menitikberatkan pada solusi berbasis alam, pertanian ramah lingkungan, pengelolaan berbasis DAS dan kearifan lokal masyarakat. Ekosistem yang sehat tidak hanya berimplikasi terhadap peningkatan produksi jasa lingkungan (termasuk produk komoditas) tetapi juga peningkatan resiliensi terhadap berbagai guncangan (*shock*), salah satunya akibat adanya perubahan iklim.

4. Penurunan emisi Gas Rumah Kaca yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Pengendalian emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor berbasis lahan, termasuk pengelolaan pada ekosistem pesisir dan budidaya peternakan, tidak dapat dielakkan sebagai upaya pencegahan terhadap dampak perubahan iklim yang semakin ekstrem. Upaya ini juga mencakup peningkatan sekuestrasi dari sektor berbasis lahan.

Selengkapnya, rumusan tujuan dan lingkup (sasaran) masing-masing tujuan pertumbuhan ekonomi hijau Provinsi NTT dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Rumusan Tujuan dan Lingkup (Sasaran) Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi NTT (Sementara)

Draft Tujuan Pertumbuhan Ekonomi Hijau NTT		Lingkup (Sasaran)
1	Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif dan berkeadilan	<ul style="list-style-type: none">Berorientasi pada <i>equity</i> dan <i>equality</i>Penurunan angka kemiskinanIntegrasi <i>blue economy</i>Infrastruktur
2	Ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang tangguh berbasis desa	<ul style="list-style-type: none">Ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklimKetahanan panganPenurunan <i>stunting</i>Responsif genderPenguatan sumber daya manusia

Draft Tujuan Pertumbuhan Ekonomi Hijau NTT		Lingkup (Sasaran)
3	Ekosistem yang sehat dan produktif dalam menghasilkan jasa lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Ketahanan terhadap perubahan iklim • Pertanian ramah lingkungan • Insentif jasa lingkungan • Pengelolaan DAS • Kearifan lokal masyarakat • Perlindungan kehati
4	Penurunan emisi Gas Rumah Kaca yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Emisi dari perubahan penggunaan lahan • Emisi dari pertanian dan peternakan • Peningkatan sekuestrasi dari sektor lahan

Strategi Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Perumusan strategi pertumbuhan ekonomi hijau di NTT menerjemahkan tujuan menjadi pokok-pokok strategi yang konkret sebagai berikut.

1. Alokasi tata guna lahan berkelanjutan berbasis DAS dan kesesuaian lahan.

Perencanaan yang terintegrasi, berbasis DAS (dari hulu ke hilir), dan melibatkan kerja sama multipihak dan multiwilayah perlu dikedepankan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Dengan prioritas pada desa-desa tertinggal, strategi ini bertujuan untuk mendorong perencanaan pembangunan yang dapat mengoptimalkan sumber daya alam yang beragam sesuai dengan karakteristik dan potensi di setiap daerah di NTT.

2. Penguatan kelembagaan dan peningkatan akses terhadap 5 (lima) modal penghidupan yang sensitif terhadap GEDSI.

Untuk membangun masyarakat yang berketahanan, penting untuk memastikan akses mereka terhadap berbagai sumber modal penghidupan, terutama untuk masyarakat yang termasuk ke dalam kelompok inklusi. Strategi ini bertujuan untuk memperluas akses masyarakat terhadap lima modal penghidupan agar dapat melakukan diversifikasi sumber penghidupan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan. Selain itu, strategi ini juga bertujuan untuk memastikan inklusivitas melalui pelibatan perempuan dan kelompok rentan, sehingga tidak ada yang tertinggal dalam proses pembangunan.

3. Optimalisasi produktivitas, diversifikasi, peningkatan daya saing dan nilai tambah sektor unggulan daerah yang berketahanan iklim.

Tantangan perubahan iklim memberikan tekanan terhadap produktivitas sektor ekonomi, seperti ancaman gagal panen dan menurunnya penghidupan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan optimalisasi sektor unggulan daerah agar dapat tahan terhadap disrupsi yang mungkin terjadi akibat perubahan iklim dan menjaga penghidupan masyarakat, termasuk menjaga ketahanan pangan, air dan energi. Strategi ini berupaya mendorong produktivitas, diversifikasi, daya saing dan peningkatan nilai tambah sektor ekonomi unggulan serta kapasitas para pelaku pada sektor berbasis lahan, seperti *smallholder farmers* dan petani musiman.

4. Penguatan *supply chain* dan konektivitas ekonomi wilayah yang berkeadilan.

Untuk mempertahankan nilai tawar petani dari hulu ke hilir, intervensi terhadap rantai nilai menjadi krusial. Dalam perencanaan pembangunan hijau, fokus diberikan pada peningkatan rantai nilai komoditas, baik dalam ekspor ke luar daerah maupun luar negeri, dan penguatan konektivitas ekonomi wilayah yang efektif dan efisien yang mendukung industri hilir. Strategi ini juga berupaya menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk meningkatkan pemerataan pembangunan yang lebih berkeadilan. Penguatan rantai nilai dan konektivitas ekonomi wilayah yang berkelanjutan diharapkan dapat memberikan manfaat yang setara untuk para pelaku sektor di tingkat tapak.

5. Restorasi lahan, hutan dan sumber daya air.

Strategi ini bertujuan untuk melindungi lahan, hutan, dan sumber daya air dari kegiatan yang ekstraktif dan mengakibatkan degradasi lingkungan hidup. Beberapa upaya yang didorong adalah pengendalian pemanfaatan hutan dari kegiatan *illegal logging*, restorasi lahan kritis, dan pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan lahan marginal berbasis kearifan lokal yang mendukung restorasi lahan, hutan, dan sumber daya air.

6. Pendanaan inovatif multipihak melalui mekanisme investasi dan insentif jasa lingkungan.

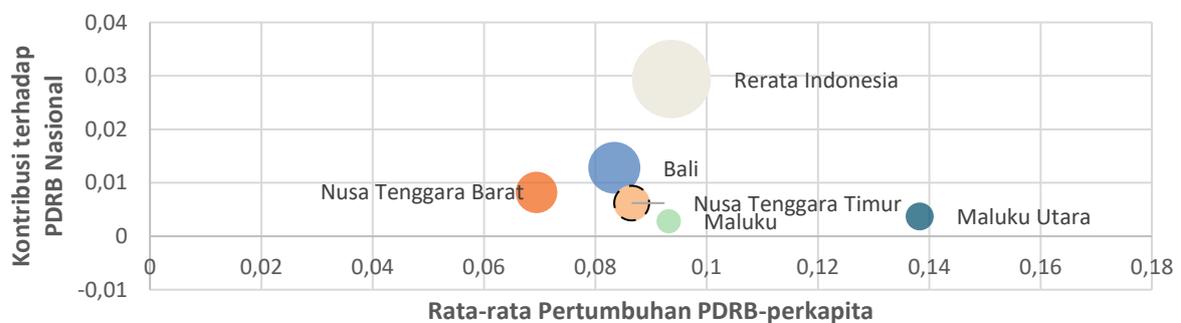
Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui pengembangan pendanaan inovatif berbasis lingkungan. Dengan meningkatkan kapasitas fiskal daerah, maka daerah dapat lebih efektif mengelola sumber daya lingkungan terutama dalam menghadapi berbagai tantangan seperti pengurangan risiko bencana dan menyediakan layanan yang berkualitas bagi masyarakat. Penting didorong melalui strategi ini di antaranya adalah *database* pendanaan yang kuat dan mekanisme kerja sama daerah dalam inisiasi regulasi jasa lingkungan untuk para pihak.

Konteks Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Ekonomi wilayah

PDRB NTT pada tahun 2022 menempati urutan ke-27 dari 34 provinsi. Kontribusi PDRB Provinsi NTT masih cukup jauh di bawah rerata provinsi lain di Indonesia. Apabila dilihat secara regional provinsi-provinsi kepulauan di timur Indonesia, NTT menempati urutan ketiga laju pertumbuhan PDRB (2010-2022), dengan besaran PDRB juga berada pada urutan yang sama.

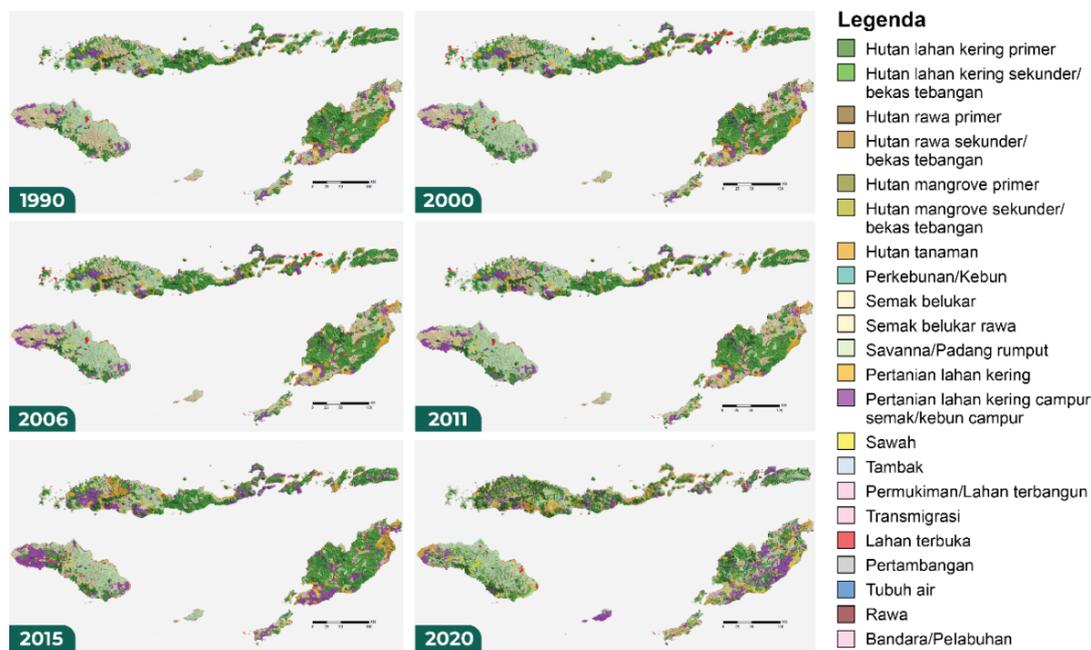
Ekonomi Provinsi NTT ditopang oleh sektor berbasis lahan dengan kontribusi paling besar berasal dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang pada tahun 2022 memberikan kontribusi sebesar 29,6 persen (**Gambar 4**). PDRB menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun meskipun mengalami perlambatan pada tahun 2019 ke 2020. Pada tahun 2022, perekonomian NTT mengalami pertumbuhan sebesar 3,05 persen.



Gambar 4. PDRB Provinsi Kepulauan di Timur Indonesia

Dinamika penggunaan lahan dan fungsi ekosistem

Perubahan mengindikasikan pergeseran penggunaan lahan di Provinsi NTT selama periode 1990-2020, tren menunjukkan peningkatan lahan pertanian dan permukiman. Pada kelas tutupan hutan terjadi penurunan pada hutan lahan kering sekunder dan hutan mangrove primer. Kelas penggunaan lahan sawah menjadi salah satu yang bertambah dengan signifikan, meskipun mengalami fluktuasi pada beberapa periode. Hal ini dapat dipengaruhi oleh perubahan pola tanam, kebijakan pertanian, serta faktor-faktor seperti kekeringan atau banjir yang mempengaruhi produktivitas lahan sawah. Peningkatan kelas penggunaan lahan permukiman mengindikasikan pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan perkembangan infrastruktur perkotaan di Provinsi NTT.



Gambar 5. Peta tutupan/penggunaan lahan NTT 1990-2020

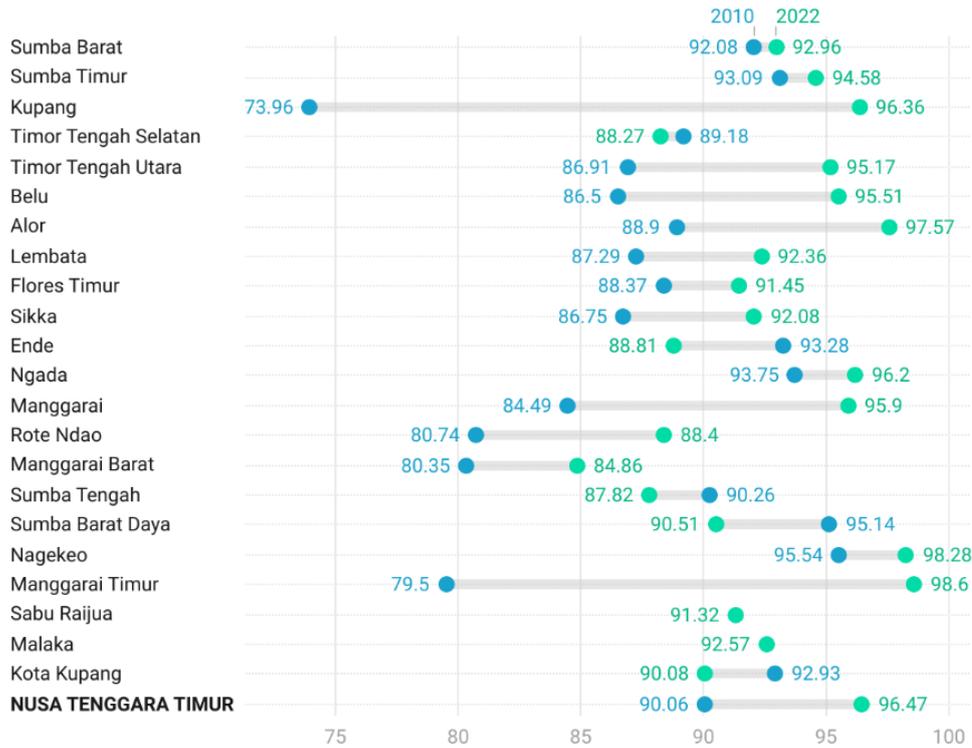
Peningkatan lahan pertanian, terutama lahan sawah, dapat memerlukan penggunaan air yang lebih intensif. Hal ini dapat berdampak pada *trade-off* ketersediaan air untuk keperluan lain, seperti konsumsi air domestik, kegiatan industri, dan kelestarian ekosistem air. Pada sisi lain, luas tutupan hutan sekunder juga terus menurun (**Gambar 5**), padahal hutan sekunder merupakan salah satu area tangkapan air untuk berbagai jasa ekosistem. Perencanaan pembangunan perlu mempertimbangkan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan untuk memastikan ketersediaan air yang cukup untuk semua sektor. Perencanaan pertumbuhan ekonomi hijau dapat memperhitungkan *trade-off* dari berbagai keputusan yang diambil dalam berbagai kebijakan perencanaan daerah.

Pengelolaan SDA yang berkeadilan (Gender)

Analisa gender memberikan perspektif pembangunan yang menyeluruh dan mempertimbangkan identitas dari semua yang terlibat dalam suatu proses pembangunan tersebut. Mengetahui bagaimana beragam identitas ini mempengaruhi individu dan kelompok masyarakat memersepsikan pembangunan menjadi penting untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif.

Ketimpangan pembangunan gender di NTT di antaranya dapat dilihat dari beberapa kondisi sebagai berikut. Capaian Indeks Pembangunan Gender menunjukkan tingkat ketimpangan Indeks Pembangunan Manusia antara perempuan dan laki-laki. Pada tahun 2010 hingga 2022, terlihat bahwa Indeks Pembangunan Gender di berbagai kabupaten/kota di NTT secara umum mengalami peningkatan, meski terdapat beberapa kabupaten/kota yang mengalami penurunan seperti Kabupaten TTS, Kabupaten Ende, Kabupaten Sumba Tengah, dan Kota Kupang. Capaian ini menunjukkan bahwa kondisi ketimpangan gender pada beberapa daerah dilihat dari indikator-indikator pembangunan manusia cenderung variatif, namun secara umum membaik.

Dari aspek ketenagakerjaan, jumlah dan proporsi lapangan kerja utama laki-laki dan perempuan juga mengalami pergeseran. Pada tahun 2015, sektor pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan menjadi lapangan kerja utama bagi perempuan dan laki-laki. Laki-laki cenderung terfokus pada lapangan kerja pertanian dan jasa kemasyarakatan, sedangkan lapangan kerja perempuan cenderung lebih variatif karena juga mencakup sektor industri pengolahan, dan perdagangan besar dan eceran serta rumah makan. Pada tahun 2022, ditemukan bahwa meski jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di atas 15 tahun yang berada di sektor pertanian meningkat, namun proporsinya cenderung menurun, sekaligus terjadi peningkatan proporsi laki-laki dan perempuan di sektor lain, seperti sektor perdagangan besar untuk laki-laki dan sektor industri pengolahan dan jasa kemasyarakatan untuk perempuan.



Gambar 6. Indeks pemberdayaan gender kabupaten/kota di NTT tahun 2010-2022

Terdapat beberapa permasalahan ketimpangan lainnya yang dirasakan oleh masyarakat. Hasil FGD bersama DP3A pada bulan November 2022 menghasilkan beberapa isu kesenjangan gender berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, diantaranya yang berkaitan dengan dampak perubahan iklim pada sektor berbasis alam:

- Dalam kondisi tidak terjadi bencana, perempuan paling banyak bertanggung jawab terhadap pengurusan anak dan tugas domestik dalam keluarga lainnya. Sedangkan dalam kondisi bencana, perempuan juga cenderung diharapkan untuk menyelamatkan anggota keluarga terlebih dahulu, sehingga kerap membahayakan diri sendiri
- Akses pada informasi kebencanaan dan peringatan dini oleh perempuan dan penyandang disabilitas masih minim, menyebabkan perempuan dan penyandang disabilitas kurang siap dan tidak bisa melakukan tindakan-tindakan penyelamatan diri atau pengurangan risiko
- Pencemaran udara akibat emisi kendaraan yang berdampak secara tidak proporsional terhadap kesehatan perempuan
- Akses air bersih belum merata
- Produksi pertanian menurun akibat pergeseran musim tanam dan hama tanaman
- Sarana dan prasarana pertanian yang ramah difabel dan berketahanan iklim masih terbatas
- Pengendalian kawasan permukiman pada daerah rawan bencana dan kawasan penyangga ekosistem belum optimal

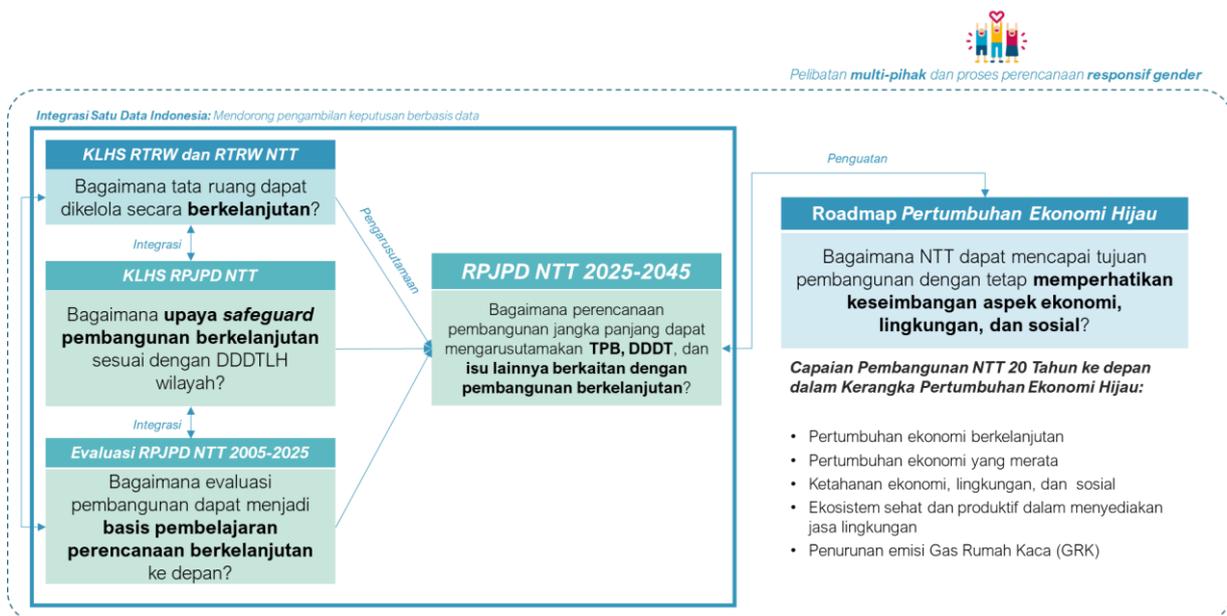
Lapangan Pekerjaan Utama	Tahun 2015				Tahun 2022			
	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki		Perempuan	
	Jumlah tenaga kerja	Persentase						
Listrik, Gas dan Air	3,124	0.25%	413	0.04%	6,571	0.42%	2,096	0.16%
Pertambangan Dan Penggalian	12,861	1.01%	5,574	0.59%	19,788	1.25%	6,951	0.52%
Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan dan Bangunan, Tanah, dan Jasa Perusahaan	21,296	1.68%	7,884	0.83%	31,886	2.03%	17,408	1.30%
Industri Pengolahan	37,543	2.96%	99,223	10.45%	90,185	5.73%	243,167	18.12%
Bangunan	73,758	5.81%	996	0.10%	119,530	7.60%	3,358	0.25%
Perdagangan Besar Dan Eceran, Rumah Makan	82,659	6.51%	106,450	11.21%	128,953	8.20%	5,124	0.38%
Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	102,575	8.08%	2,516	0.27%	147,248	9.36%	209,876	15.64%
Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	154,389	12.16%	139,734	14.72%	219,170	13.53%	225,081	16.77%
Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan	781,818	61.56%	586,478	61.78%	809,845	51.48%	629,056	45.87%
Total	1,270,023	100.00%	949,268	100.00%	1,573,176	100.00%	1,342,117	100.00%

Gambar 7. Komposisi lapangan kerja utama laki-laki dan perempuan

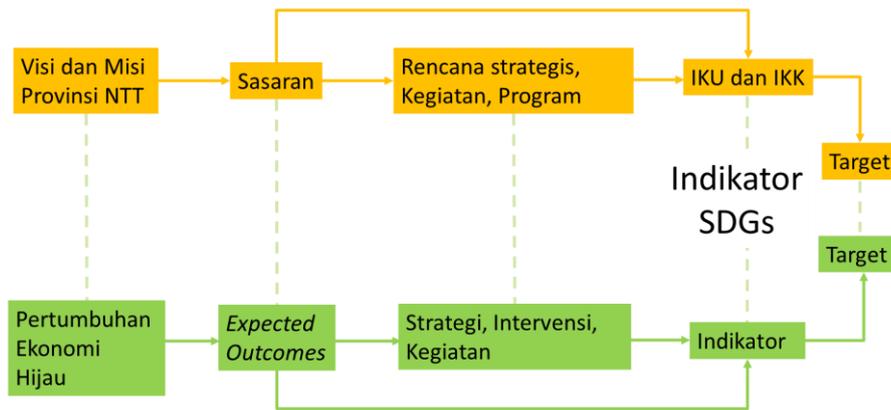
Relevansi Perencanaan Pertumbuhan Ekonomi Hijau dengan Perencanaan RPJPD Provinsi NTT 2025-2045

Rencana induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi NTT diharapkan dapat menjembatani antara strategi rencana pembangunan dan penataan ruang, serta yang paling utama adalah menyinergikan antara tujuan pembangunan dan keberlanjutan sumber daya alam dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. **Oleh karena itu, proses penyusunan Rencana induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau NTT dilakukan selaras dengan proses dan substansi yang tercantum dalam berbagai dokumen perencanaan di daerah, di antaranya penyusunan RPJPD Provinsi NTT 2025-2045 (Gambar 8).**

Secara lebih detail, substansi perencanaan pertumbuhan ekonomi hijau menjadi pelengkap pada setiap komponen perencanaan daerah, mulai dari visi dan misi, sasaran, arah kebijakan, rencana, indikator dan target pembangunan (Gambar 9).



Gambar 8. Skema integrasi pertumbuhan ekonomi hijau Provinsi NTT dengan Perencanaan Daerah



Gambar 9. Keterkaitan komponen rencana pertumbuhan ekonomi hijau dengan komponen perencanaan daerah jangka panjang dan menengah

Beberapa aspek penting sinkronisasi penyusunan Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi NTT dengan RPJPD Provinsi NTT 2025-2045 adalah sebagai berikut.

- 1. Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi NTT mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045 yang tercantum dalam RPJPN 2025-2045, yang mencantumkan salah satu arah kebijakan utama dalam transformasi ekonomi adalah melalui penerapan ekonomi hijau.**

Pada tahun 2045, Indonesia menargetkan intensitas emisi gas rumah kaca menurun menuju *net zero emission*. Pada tahun 2022, Indeks Ekonomi Hijau (*Green Economy Index* atau GEI) dirilis oleh Bappenas yang merupakan salah satu pijakan untuk mencapai ekonomi hijau yang memberikan manfaat bagi ekonomi, sosial dan lingkungan secara seimbang. Dengan diadikannya GEI provinsi sebagai salah satu indikator pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah diharapkan memiliki peran penting dalam pencapaian target ekonomi hijau daerah.

- 2. Penyusunan Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau telah mengintegrasikan visi-misi provinsi dan kabupaten/kota dengan tujuan perencanaan pertumbuhan ekonomi hijau provinsi.**

Hal ini mencakup pemahaman terhadap program dan kegiatan berbasis lahan yang relevan, identifikasi pelaku yang terlibat, serta pemahaman terhadap tantangan dan kesempatan yang dihadapi dalam pengelolaan bentang lahan yang berkelanjutan. Perencanaan pertumbuhan ekonomi hijau membantu mengenali komoditi unggulan di setiap kabupaten/kota, merinci rantai nilai hulu-hilir, dan mengevaluasi opsi intervensi yang dapat diterapkan.

- 3. Proses penyusunan Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi NTT mengacu dan diselaraskan dengan berbagai dokumen kebijakan lainnya, seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Rancangan Awal RPJPD Provinsi NTT 2025-2045.**

Berbagai diskusi dan lokakarya dilakukan terintegrasi untuk mengarusutamakan komponen analisis yang dilakukan dalam pertumbuhan ekonomi hijau dengan proses perencanaan formal yang sedang berjalan, termasuk dalam pengarusutamaan isu kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Untuk menjamin perencanaan yang mendukung keadilan dan kesetaraan, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan menjadi poin kunci dalam proses ini.

Sustainable Landscapes for Climate-Resilient Livelihoods (Land4Lives) in Indonesia atau #LahanuntukKehidupan adalah proyek lima tahun yang didanai Oleh Global Affairs Canada, untuk tata kelola bentang lahan yang lebih baik, ketahanan pangan, kesetaraan gender dan perubahan iklim. Pelaksanaan proyek yang mencakup Provinsi Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan dan Nusa Tenggara Timur dipimpin oleh World Agroforestry (ICRAF) Indonesia.

Informasi Lebih lanjut:

Pokja Penyusunan GGP Provinsi NTT

Bappelitbangda Provinsi NTT

Alamat: Jl. Polisi Militer No. 2, Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang, NTT (0280) 8333462



www.lahanuntukkehidupan.id